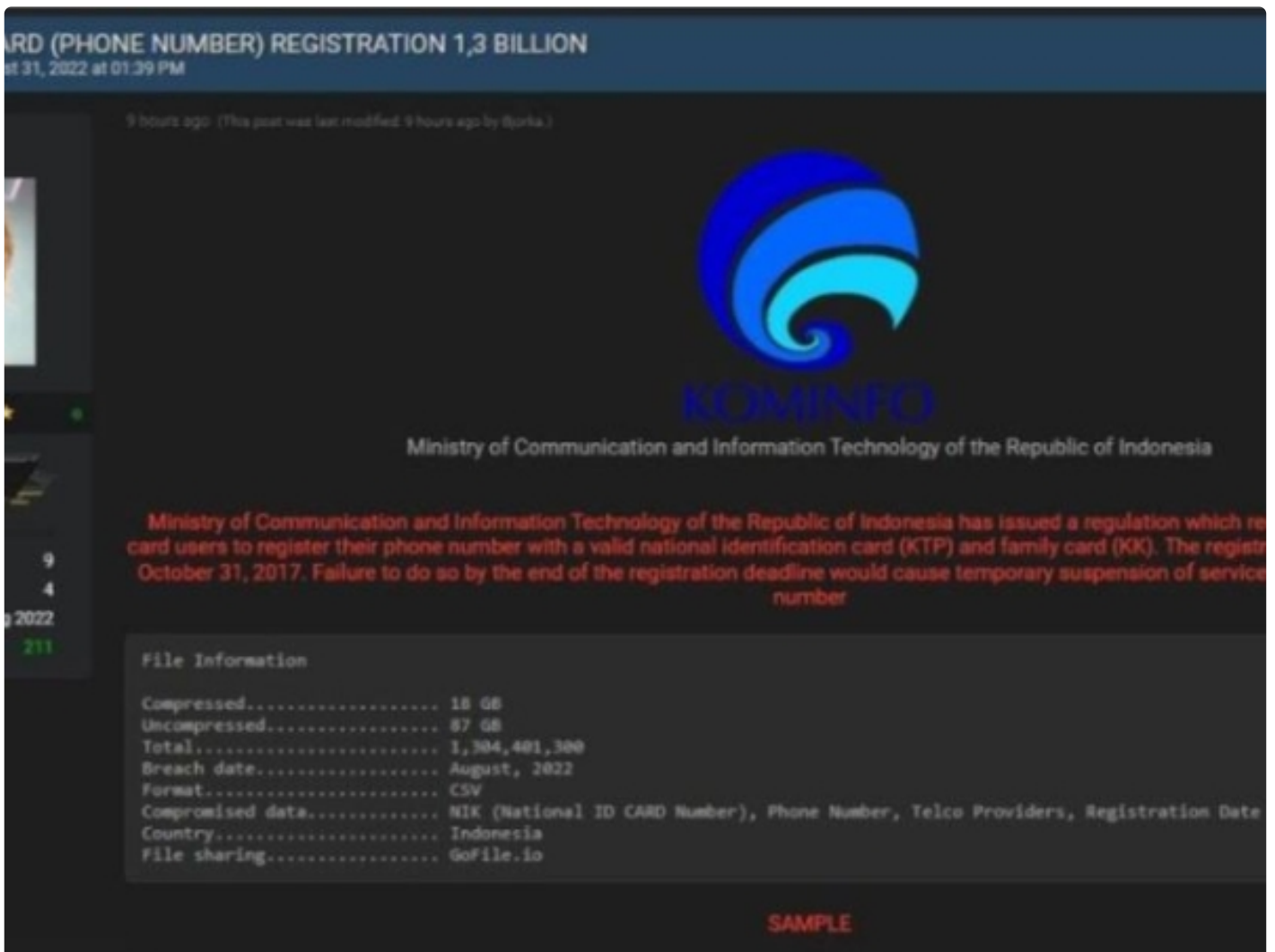


1,3 Milyar Data Registrasi SIM Card Masyarakat Tanah Air Bocor

Updates. - INFORMAN.ID

Sep 1, 2022 - 20:06



JAKARTA - Setelah rentetan kebocoran yang hampir tiap hari terjadi pada bulan Agustus 2022 pada beberapa Perusahaan baik negara maupun swasta seperti PLN, Indihome, maupun data Kampus, data Sekolah, data penduduk, database 21 ribu perusahaan, dan lainnya. Kali ini ada 1,3 Miliar data registrasi sim card masyarakat tanah air yang bocor.

Dalam keterangannya pada Rabu siang (01/09/2022), pakar keamanan siber

Pratama Persadha menjelaskan bahwa kebocoran tersebut diunggah hari Selasa siang 31 Agustus oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka' yang juga membocorkan data riwayat pelanggan Indihome beberapa waktu lalu. Pengunggah tersebut juga memberikan sample data sebanyak 1,5 juta data.

NIK	Nomor Ponsel	Operator Seluler	Tanggal Registrasi
1597788			2021-08-01
1597789			2021-08-01
1597790			2021-08-01
1597791			2021-08-01
1597792			2021-08-01
1597793			2021-08-01
1597794			2021-08-01
1597795			2021-08-01
1597796			2021-08-01
1597797			2021-08-01
1597798			2021-08-01
1597799			2021-08-01
1597800			2021-08-01
1597801			2021-08-01
1597802			2021-08-01
1597803			2021-08-01
1597804			2021-08-01
1597805			2021-08-01
1597806			2021-08-01
1597807			2021-08-01
1597808			2021-08-01
1597809			2021-08-01
1597810			2021-08-01
1597811			2021-08-01
1597812			2021-08-01
1597813			2021-08-01
1597814			2021-08-01
1597815			2021-08-01
1597816			2021-08-01
1597817			2021-08-01
1597818			2021-08-01
1597819			2021-08-01
1597820			2021-08-01
1597821			2021-08-01
1597822			2021-08-01
1597823			2021-08-01
1597824			2021-08-01
1597825			2021-08-01
1597826			2021-08-01
1597827			2021-08-01
1597828			2021-08-01
1597829			2021-08-01
1597830			2021-08-01

"Jika diperiksa, sample data yang diberikan tersebut memuat sebanyak 1.597.830 baris berisi data registrasi sim card milik masyarakat Indonesia. isinya berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor ponsel, nama provider, dan tanggal registrasi. Penjual juga mencantumkan harga sebesar 50.000 dollar atau sekitar 700 juta rupiah dan transaksi hanya menggunakan mata uang kripto",

terang chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Pratama mengemukakan, data pastinya berjumlah 1.304.401.300 baris dengan total ukuran mencapai 87 GB. Ketika sampel data dicek secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, maka nomor tersebut masih aktif semuanya. Berarti dari 1,5 juta sampel data yang diberikan merupakan data yang valid. Untuk mengecek apakah data kita termasuk kedalam 1,5 juta sampel data yang dibagikan atau tidak, bisa menggunakan situs www.periksadata.com dengan memasukkan nomor ponsel.

"Sampai saat ini sumber datanya masih belum jelas. Dari pihak Kominfo, Dukcapil, maupun Operator seluler juga telah membantah bahwa datanya dari server mereka. Masalahnya saat ini hanya mereka (Kominfo, Dukcapil, Operator seluler) yang memiliki dan menyimpan data ini. Kalau Operator Seluler sepertinya tidak mungkin, karena sample datanya lintas operator. Jalan terbaik harus dilakukan audit dan investigasi digital forensic untuk memastikan kebocoran data ini dari mana. Sangat mustahil jika data yang bocor ini tidak ada yang mempunyainya.

Namun kalau kita melihat sample data yang datanya dari semua operator maka seharusnya cuma Kominfo yang bisa mempunya data ini, Tapi kita perlu pastikan dulu." imbuhnya.

Ditambahkan Pratama bahwa jika data ini benar, artinya semua nomor ponsel di Indonesia sudah bocor baik itu sim card prabayar maupun pascabayar. Dan sangat rawan sekali data ini jika digabungkan dengan data - data kebocoran yang lain, bisa menjadi data profile lengkap yang bisa dijadikan data dasar dalam melakukan tindak kejahatan penipuan atau kriminal yang lain.

"Dengan kondisi di Indonesia yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga tidak ada upaya memaksa dari negara kepada peneyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal atau dengan standar tertentu. Akibatnya banyak terjadi kebocoran data, namun tidak ada yang bertanggungjawab, semua merasa menjadi korban. Padahal soal ancaman peretasan ini sudah diketahui luas, seharusnya PSE melakukan pengamanan maksimal, misalnya dengan menggunakan enkripsi/penyandian untuk data pribadi masyarakat. Minimal melakukan pengamanan maksimal demi nama baik lembaga atau perusahaan." Kata pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.

Pratama menjelaskan bahwa Di Uni Eropa denda bisa mencapai 20 juta euro untuk setiap kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi masyarakat. BSSN juga harus masuk lebih dalam pada berbagai kasus kebocoran data di tanah air, minimal menjelaskan ke publik bagaimana dan apa saja yang dilakukan berbagai lembaga publik yang mengalami kebocoran data akibat peretasan.

"Karena selama ini selain tidak ada sanksi yang berat, karena belum adanya UU PDP, pasca kebocoran data tidak jelas apakah lembaga bersangkutan sudah melakukan perbaikan atau belum. Jadi publik perlu tahu, dan bila ini terus terjadi maka dunia internasional akan meningkat ketidakpercayaan pada Indonesia.

Padahal Indonesia kini “pemimpin” G20, jangan sampai ajang G20 nanti dihiasi kebocoran data,” terangnya.

Narasumber

Dr Pratama Persadha

Chairman CISSReC